



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 67 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian pagu dan petunjuk teknis atas kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum Tambahan dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Batang, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 14);
28. Peraturan Bupati Batang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 67) telah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp 1.867.759.821.977,00 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|--|----|----------------------|
| 1. Pendapatan | | |
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp | 246.398.162.977,00 |
| b. Dana Perimbangan | Rp | 1.154.194.960.000,00 |
| semula | Rp | 1.142.714.564.000,00 |
| bertambah | Rp | 11.480.396.000,00 |
| c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp | 467.166.699.000,00 |
| semula | Rp | 451.504.699.000,00 |
| berkurang | Rp | 15.622.000.000,00 |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | Rp | 1.867.759.821.977,00 |
| 2. Belanja | | |
| a. Belanja Tidak Langsung | | |
| 1) Belanja Pegawai | Rp | 729.425.718.383,00 |
| semula | Rp | 738.806.641.383,00 |
| berkurang | Rp | 9.380.923.000,00 |
| 2) Belanja Hibah | Rp | 72.139.115.000,00 |
| semula | Rp | 71.380.315.000,00 |
| bertambah | Rp | 758.800.000,00 |
| 3) Belanja Bantuan Sosial | Rp | 35.446.225.000,00 |
| semula | Rp | 30.019.350.000,00 |
| bertambah | Rp | 5.426.875.000,00 |
| 4) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa | Rp | 107.921.326.000,00 |
| 5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | Rp | 312.329.577.264,00 |
| semula | Rp | 311.867.577.264,00 |
| bertambah | Rp | 462.000.000,00 |
| 6) Belanja Tidak Terduga | Rp | 2.000.000.000,00 |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan | Rp | 1.160.603.132.647,00 |
| b. Belanja Langsung | | |
| 1) Belanja Pegawai | Rp | 84.742.356.520,00 |
| semula | Rp | 83.314.928.520,00 |
| bertambah | Rp | 1.427.428.000,00 |
| 2) Belanja Barang dan Jasa | Rp | 435.836.815.743,00 |
| semula | Rp | 434.123.309.086,00 |
| bertambah | Rp | 1.713.506.657,00 |
| 3) Belanja Modal | Rp | 236.577.517.067,00 |
| semula | Rp | 209.842.807.724,00 |
| bertambah | Rp | 26.734.709.343,00 |
| Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan | Rp | 757.156.689.330,00 |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan | Rp | 1.917.759.821.977,00 |
| Defisit | Rp | 50.000.000.000,00 |



| | | |
|--|----|-------------------|
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan | Rp | 85.000.000.000,00 |
| b. Pengeluaran | Rp | 35.000.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan | Rp | 50.000.000.000,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) | Rp | 0,00 |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 11 Februari 2020

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 11 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd


LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001



| <div><div>PEMERINTAH KABUPATEN BATANG</div><div>RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN 2020</div></div> | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| 1 | PENDAPATAN | 1.840.617.425.977,00 | 1.867.759.821.977,00 | 27.142.396.000,00 | 1,47 |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 246.398.162.977,00 | 246.398.162.977,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 79.975.000.000,00 | 79.975.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 18.566.493.700,00 | 18.566.493.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 11.153.980.293,00 | 11.153.980.293,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 136.702.688.984,00 | 136.702.688.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | DANA PERIMBANGAN | 1.142.714.564.000,00 | 1.154.194.960.000,00 | 11.480.396.000,00 | 1,00 |
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 40.829.780.000,00 | 40.829.780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 835.669.833.000,00 | 835.669.833.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 266.214.951.000,00 | 277.695.347.000,00 | 11.480.396.000,00 | 4,31 |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 451.504.699.000,00 | 467.166.699.000,00 | 15.662.000.000,00 | 3,47 |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 107.921.326.000,00 | 107.921.326.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 15.662.000.000,00 | 15.662.000.000,00 | 0,00 |
| 1.3.6 | Dana Desa | 195.614.218.000,00 | 195.614.218.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 | Dana BOS | 69.433.400.000,00 | 69.433.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9 | Dana Insentif Daerah (DID) | 78.535.755.000,00 | 78.535.755.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | BELANJA | 1.890.617.425.977,00 | 1.917.759.821.977,00 | 27.142.396.000,00 | 1,44 |
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.163.336.380.647,00 | 1.160.603.132.647,00 | (2.733.248.000,00) | (0,23) |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 738.806.641.383,00 | 729.425.718.383,00 | (9.380.923.000,00) | (1,27) |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 71.380.315.000,00 | 72.139.115.000,00 | 758.800.000,00 | 1,06 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 30.019.350.000,00 | 35.446.225.000,00 | 5.426.875.000,00 | 18,08 |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 9.262.497.000,00 | 9.262.497.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 311.867.577.264,00 | 312.329.577.264,00 | 462.000.000,00 | 0,15 |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG | 727.281.045.330,00 | 757.156.689.330,00 | 29.875.644.000,00 | 4,11 |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 83.314.928.520,00 | 84.742.356.520,00 | 1.427.428.000,00 | 1,71 |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 434.123.309.086,00 | 435.836.815.743,00 | 1.713.506.657,00 | 0,39 |



| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| 2 . 2 . 3 | Belanja Modal | 209.842.807.724,00 | 236.577.517.067,00 | 26.734.709.343,00 | 12,74 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (50.000.000.000,00) | (50.000.000.000,00) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| 3 . 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 85.000.000.000,00 | 85.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 . 1 . 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 55.000.000.000,00 | 55.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 . 1 . 4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 30.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 . 2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 35.000.000.000,00 | 35.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 . 2 . 2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 . 2 . 3 | Pembayaran Pokok Utang | 30.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 50.000.000.000,00 | 50.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| 2 . 2 . 3 | Belanja Modal | 209.842.807.724,00 | 236.577.517.067,00 | 26.734.709.343,00 | 12,74 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (50.000.000.000,00) | (50.000.000.000,00) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| 3 . 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 85.000.000.000,00 | 85.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 . 1 . 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 55.000.000.000,00 | 55.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 . 1 . 4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 30.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 . 2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 35.000.000.000,00 | 35.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 . 2 . 2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 . 2 . 3 | Pembayaran Pokok Utang | 30.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 50.000.000.000,00 | 50.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BUPATI BATANG,
ttd
WIHAJI




| PEMERINTAH KABUPATEN BATANG | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------------------|------|-----------------------|
| RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN | | | | | | |
| TAHUN ANGGARAN 2020 | | | | | | |
| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 |
| 4 | PENDAPATAN | 1.840.617.425.977,00 | 1.867.759.821.977,00 | 27.142.396.000,00 | 1,47 | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 246.398.162.977,00 | 246.398.162.977,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 79.975.000.000,00 | 79.975.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.1.01 | Pajak Hotel | 547.000.000,00 | 547.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.1.01.05 | Hotel Bintang Dua | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 3 Tahun 2019 |
| 4.1.1.01.06 | Hotel Bintang Satu | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 3 Tahun 2019 |
| 4.1.1.01.07 | Hotel Melati Tiga | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 3 Tahun 2019 |
| 4.1.1.01.09 | Hotel Melati Satu | 172.000.000,00 | 172.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 3 Tahun 2019 |
| 4.1.1.01.12 | Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 3 Tahun 2019 |
| 4.1.1.02 | Pajak Restoran | 3.733.000.000,00 | 3.733.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.1.02.01 | Restoran | 1.713.000.000,00 | 1.713.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 3 Tahun 2019 |
| 4.1.1.02.02 | Rumah Makan | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 3 Tahun 2019 |
| 4.1.1.02.03 | Cafe | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 3 Tahun 2019 |
| 4.1.1.02.05 | Katering | 1.950.000.000,00 | 1.950.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 3 Tahun 2019 |
| 4.1.1.03 | Pajak Hiburan | 1.049.000.000,00 | 1.049.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.1.03.07 | Karaoke | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 3 Tahun 2019 |
| 4.1.1.03.16 | Panti Pijat/Refleksi | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 3 Tahun 2019 |
| 4.1.1.03.20 | Aneka Hiburan | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 3 Tahun 2019 |
| 4.1.1.03.21 | Kolam Renang | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 3 Tahun 2019 |
| 4.1.1.03.22 | Pertunjukan Satwa | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 3 Tahun 2019 |
| 4.1.1.04 | Pajak Reklame | 1.351.000.000,00 | 1.351.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.1.04.01 | Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron | 1.105.000.000,00 | 1.105.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 3 Tahun 2019 |
| 4.1.1.04.02 | Reklame Kain | 220.500.000,00 | 220.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 3 Tahun 2019 |
| 4.1.1.04.04 | Reklame Selebaran | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 3 Tahun 2019 |
| 4.1.1.04.05 | Reklame Berjalan | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 3 Tahun 2019 |
| 4.1.1.05 | Pajak Penerangan Jalan | 33.500.000.000,00 | 33.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.1.05.01 | Pajak Penerangan Jalan PLN | 33.500.000.000,00 | 33.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Perda No 3 Tahun 2019 |



| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|-------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | 7 |
| 6 . 2 . 2 . 02 . 02 | BUMD BPD | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 . 2 . 2 . 02 . 03 | PDAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 . 2 . 3 | Pembayaran Pokok Utang | 30.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 . 2 . 3 . 03 | Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank | 30.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 . 2 . 3 . 03 . 01 | Bank.. | 30.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 50.000.000.000,00 | 50.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

BUPATI BATANG,
ttd
WIHAJI



| <div><div>PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div></div> | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------------|------|---|
| <div>Urusan Pemerintahan : 4.05 Urusan Penunjang / Pemerintahan Kepegawaian Organisasi : 4.05.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 4.05.01.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</div> | | | | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5 | BELANJA | 11.166.648.735,00 | 11.166.648.735,00 | 0,00 | 0,00 | Lokasi Kegiatan : Kabupaten Batang |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3.555.955.885,00 | 3.555.955.885,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 | Non Kegiatan | 3.555.955.885,00 | 3.555.955.885,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1 | Belanja Pegawai | 3.555.955.885,00 | 3.555.955.885,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01 | Gaji dan Tunjangan | 2.473.055.885,00 | 2.473.055.885,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.888.360.680,00 | 1.888.360.680,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 143.528.782,00 | 143.528.782,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 162.750.000,00 | 162.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04 | Tunjangan Fungsional | 32.803.200,00 | 32.803.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | 51.326.400,00 | 51.326.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 80.959.766,00 | 80.959.766,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 19.290.666,00 | 19.290.666,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 64.607,00 | 64.607,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09 | Iuran BPJS | 78.366.314,00 | 78.366.314,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21 | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 3.901.382,00 | 3.901.382,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22 | Iuran Jaminan Kematian | 11.704.088,00 | 11.704.088,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02 | Tambahan Penghasilan PNS | 1.082.900.000,00 | 1.082.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja | 1.082.900.000,00 | 1.082.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 01.01 . 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 7.610.692.850,00 | 7.610.692.850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.167.573.300,00 | 1.167.573.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.113.000,00 | 2.113.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 01.01 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.113.000,00 | 2.113.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 01.01 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.113.000,00 | 2.113.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 2.113.000,00 | 2.113.000,00 | 0,00 | 0,00 | |



| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|------|------------------------------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.05 . 4.05.01 . 28.14 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.485.300,00 | 2.485.300,00 | 0,00 | 0,00 | Lokasi Kegiatan : Kabupaten Batang |
| 4.05 . 4.05.01 . 28.14 . 5.2.2.01.08 | Belanja Dekorasi | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 28.14 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 28.14 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 28.14 . 5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 28.14 . 5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 28.14 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 7.625.000,00 | 7.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 28.14 . 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 7.625.000,00 | 7.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 28.14 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 25.389.700,00 | 25.389.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 28.14 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 25.389.700,00 | 25.389.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 28.14 . 5.2.2.26 | Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara / Praktisi/ Pakar | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 28.14 . 5.2.2.26.01 | Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara / Praktisi/ Pakar PNS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 29 | Program Pendidikan Kedinasan | 83.636.600,00 | 83.636.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 29.01 | Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme | 83.636.600,00 | 83.636.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.1 | Belanja Pegawai | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 79.136.600,00 | 79.136.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 919.500,00 | 919.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 919.500,00 | 919.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 617.100,00 | 617.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 617.100,00 | 617.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.17 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.17.01 | Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (11.166.648.735,00) | (11.166.648.735,00) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |



| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------------|---|------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

BUPATI BATANG,
ttd
WIHAJI



RINCIAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL,
BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

| RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------|---------------|--------------------|---------------------|--------|---------------|--------------------|---------------------------|------|
| KODE REKENING | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | |
| | | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | (Rp) | % |
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3X5 | 7 | 8 | 9 | 10=7X9 | 11 | 12 |
| 5 | BELANJA | | | | 424.529.739.264,00 | | | | 431.177.414.264,00 | 6.647.675.000,00 | 1,57 |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | 424.529.739.264,00 | | | | 431.177.414.264,00 | 6.647.675.000,00 | 1,57 |
| 5.1.4 | Belanja Hibah | | | | 71.380.315.000,00 | | | | 72.139.115.000,00 | 758.800.000,00 | 1,06 |
| 5.1.4.05 | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga | | | | 68.332.815.000,00 | | | | 68.941.615.000,00 | 608.800.000,00 | 0,89 |
| 5.1.4.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi..... | | | | 68.332.815.000,00 | | | | 68.941.615.000,00 | 608.800.000,00 | 0,89 |
| | BAG KESRA | | | | 36.496.450.000,00 | | | | 36.496.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Bantuan Dana Untuk Renovasi Tempat Wudhu dan Renovasi Musholla "MIFTAHUL JANA" Dk. Sekalong Rt. 03 Rw. 02 Karangasem Selatan Batang | 1 | Tahun | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1 | Tahun | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Bantuan Seragam Jamaah Tahlil NAILUSY SYAFAATI, Dukuh Pringombo, Desa Ngadirejo | 1 | Tahun | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 1 | Tahun | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Bantuan Alat Kematian dan Meja Kursi Jamaah Tahlil Al Firdaus, Dukuh Depok Wetan, Rt 03 Rw 03, Desa Depok | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Bantuan Alat Kematian Majelis Taklim Al Huda, Dukuh Tegaron, Rt 05 Rw 01 Desa Besani, Kec Blado | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Bantuan Dana Jamaah Tahlil Al Khikmah RT 12 Rw 02 | 1 | Tahun | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 1 | Tahun | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Bantuan Dana Mushola Al Hidayah RT 03 RW 01 | 1 | Tahun | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1 | Tahun | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Bantuan Dana Mushola Almukaromah | 1 | Tahun | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 1 | Tahun | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |



RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | |
|------------------|--------|---------------------|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|-----------------|--------|---------------------------|----|
| | | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | (Rp) | % |
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3X5 | 7 | 8 | 9 | 10=7X9 | 11 | 12 |

BUPATI BATANG,
ttd
WIHAJI